

Kepemimpinan Politik Joko Widodo Dalam Politik Luar Negeri

Muhammad Fachri Aziz¹, Dian Ariyani Surya²

^{1,2}Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Fachrimuhammad451@gmail.com

Abstract

This research aims to find out and analyse the political leadership of Joko Widodo in Indonesia's foreign policy who is the seventh President of the Republic of Indonesia. The results of this study show that every Indonesian political leadership has distinctive characteristics in Indonesian foreign policy according to its national interests. President Joko Widodo in Indonesia's foreign policy is inward looking with the principle of free and active. Where the President wants the Indonesian state to become the world's maritime axis by using diplomacy accompanied by improving defence and security aspects. In addition, Indonesia's foreign policy in the economic aspect uses the economic diplomacy path that visits several countries to get foreign investment to encourage the development of Indonesia's infrastructure and economy. In addition to seeking foreign investment in advancing the economy, President Joko Widodo wants to dominate the world halal market by using economic diplomacy by promoting halal products in Indonesia by organising international forums with the theme of halal products by inviting several countries.

Keywords: Political Leadership, Foreign Policy and Joko Widodo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepemimpinan politik Joko Widodo dalam politik luar negeri Indonesia yang merupakan Presiden ketujuh Republik Indonesia. Hasil penelitian ini bahwa setiap kepemimpinan politik Indonesia memiliki ciri khas dalam politik luar negeri Indonesia sesuai kepentingan nasionalnya. Presiden Joko Widodo dalam politik luar negeri Indonesia orientasi ke dalam (Inward looking) dengan prinsip bebas aktif. Dimana Presiden berkeinginan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan menggunakan jalur diplomasi yang disertai dengan meningkatkan aspek pertahanan dan keamanan. Selain itu dalam politik luar negeri Indonesia dalam aspek ekonomi menggunakan jalur diplomasi ekonomi yang berkunjung ke beberapa negara untuk mendapatkan investasi asing mendorong pembangunan infrastruktur dan perekonomian Indonesia. Selain mencari investasi asing dalam memajukan perekonomian, Presiden Joko Widodo berkeinginan untuk menguasai pasar halal dunia dengan menggunakan jalur diplomasi ekonomi dengan mempromosikan produk-produk halal negara Indonesia dengan menyelenggarakan forum-forum internasional dengan bertepatan produk halal dengan mengundang beberapa negara.

Kata kunci : Kepemimpinan Politik, Politik Luar Negeri dan Joko Widodo

A. Pendahuluan

Kemenangan Presiden Joko Widodo dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia melalui pemilihan umum 2014 mengalami perubahan dalam politik luar negeri Indonesia. Dimana dalam kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam politik luar negeri Indonesia orientasi ke “luar” (*Outward looking*), sedangkan sekarang dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo politik luar negeri Indonesia orientasi ke “dalam” (*Inward Looking*). Kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo yang bersifat “*Inward Looking*” merupakan prinsip dasar dalam politik luar negeri Indonesia yang dikenal sebagai prinsip “bebas-aktif”. Prinsip “Bebas aktif” dalam politik luar negeri Indonesia mempunyai makna yang mendalam. Pertama, politik luar negeri Indonesia bertujuan untuk menjaga keutuhan jati diri bangsa. Makna kedua dari “bebas aktif” adalah bahwa politik luar negeri juga memiliki tujuan untuk mencapai cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dimana Presiden Joko Widodo telah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam Upaya memenangkan kampanye untuk mendukung doktrin poros maritim, Presiden Joko Widodo menggunakan jalur diplomasi yang ditempuh. Diplomasi merupakan alat untuk mencapai kepentingan nasional dan melaksanakan kebijakan luar negeri yang di putuskan suatu negara.

Saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo melakukan sebuah kunjungan pertamanya ke beberapa negara anggota ASEAN pada tahun 2014 dan 2015 sebagai bagian dari tradisi pengenalan pemimpin baru ke negara-negara ASEAN serta mengkomunikasikan sebuah kebijakan baru yaitu, menekankan kedudukan negara Indonesia sebagai negara maritim dan sekaligus menjelaskan visi poros maritim dunia. Tindakan ini dapat dianggap sebagai ofensif diplomasi yang akhirnya berhasil menyepakati sejumlah perjanjian dan komunike bersama termasuk perjanjian kerjasama dalam bidang keamanan seperti pemberantasan penyeludupan senjata, lalu lintas teroris dan pemberantas *illegal fishing*.

Selain itu, Presiden Joko Widodo ikut aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional seperti, APEC, G20, KTT, OKI, forum multilateral, G15 dan sebagainya, yang dimana forum-forum ini digunakan untuk memperoleh dukungan negara-negara asing terhadap gagasan poros maritim dunia dengan tujuan untuk mencapai penerimaan internasional yang lebih luas terhadap gagasan tersebut. Dimana Presiden Joko Widodo menegaskan doktrin poros maritim yang diusung Indonesia sebagai solusi untuk membangkitkan kedaulatan ekonomi dan politik bangsa. Dalam perdagangan impor dan ekspor melalui jalur laut menurutnya akan semakin mengukuhkan arti penting industri maritim mengingat ada dua samudera strategis

dunia yaitu, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan jalur penting dalam perdagangan global.

Dalam konsep maritim dunia menekankan pada pemanfaatan jalur transportasi laut yang kerap dihadapkan dengan berbagai sebuah tantangan salah satunya bidang pertahanan dan keamanan. Presiden Joko Widodo memanfaatkan strategis Indonesia yang memiliki peran sebagai jalur transportasi laut dan perdagangan strategis dengan merancang strategi pembangunan laut dengan mencakup infrastruktur pertahanan dan keamanan laut hingga pemanfaatan sumber daya laut. Dalam melaksanakan rancangan strategi tersebut meliputi beberapa aspek penting yang menjadi difokuskan. Pertama, pemerintah menerapkan Ocean Based Development Indonesia dengan lebih memprioritaskan sektor laut, tindakan ini menekankan bahwa kedaulatan juga dapat dilihat dari sudut pandang pengelolaan perairan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, maka diperlukan untuk memprioritaskan pembangunan industri dan pertahanan laut. Selanjutnya yang kedua mengenai aspek pertahanan dan keamanan, Presiden Joko Widodo mengusung strategi penguatan maritim yang bertujuan untuk membuat konektivitas serta memaksimalkan penggunaan jalur komunikasi dan transportasi laut (SLOC dan SLOT) yang merupakan jalur perbatasan yang sering dilintasi kapal-kapal asing. Penguatan konektivitas dianggap sebagai solusi untuk menjaga jalur perbatasan laut yang bersentuhan langsung dengan wilayah perairan negara lain, sehingga di harapkan dapat menerbitkan kapa lasing dan mengurangi tindakan ilegal seperti illegal fishing yang merugikan sumber daya laut dan melanggar batas yurisdiksi. Dalam menekankan pentingnya pertahanan dan keamanan maritim dengan membentuk Kementerian Kemaritiman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) bertujuan untuk mendukung kinerja Presiden dan meningkatkan keamanan maritim yang melibatkan TNI Angkatan Laut (AL) yang bekerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan kualitas pasukan dan pertahanan.

Dimana pada periode pertama masa Jabata Presiden Joko Widodo terdapat banyak perjanjian internasional di bidang pertahanan yang telah diratifikasi. Perjanjian internasional yang diratifikasi pada masa awal Presiden Joko Widodo sebagian besar telah di tandatangani pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam sektor pertahanan sangat menekankan peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan, terdapat tiga arah pembangunan yang diutamakan yaitu pemenuhan kebutuhan alusista, peningkatan kesiapan operasi TNI dan peningkatan fasilitas perumahan dan pelatihan prajurit TNI. Dengan fokus utamanya membangun TNI diharapkan menjadi sebuah aparat yang lebih modern dan memastikan kecukupan persenjataan dalam pertahan, Dimana pada periode kedua selama masa

jabatan Presiden Joko Widodo telah menandatangani berbagai perjanjian bilateral dalam sektor pertahanan. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi melalui peraturan undang-undang dengan menekankan bahwa setiap perjanjian harus memberi sebuah manfaat langsung bagi negara. Dalam perjanjian internasional tersebut meliputi beragam aspek mulai dari saling bertukar informasi, pelatihan bersama, hingga kerjasama dalam bidang IPTEK dan industri pertahanan lainnya.

B. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data berupa sumber-sumber informasi yang terkait dengan permasalahan utama penelitian. Menurut Sugiyono : “Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan. Analisa data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.” Penelitian kualitatif memiliki fokus pada suatu proses dan peristiwa secara interaktif. Dengan menggabungkan model atau pendekatan studi kasus. Studi kasus sendiri merupakan uraian dan penjelasan secara komprehensif mengenai berbagai aspek. Penelitian ini lebih fokus kepada data-data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi perpustakaan. Pengumpulan data-data sendiri dilakukan peneliti dengan memanfaatkan dokumen dan. Pemanfaatan dokumen dengan merujuk kepada sebuah artikel, buku-buku, jurnal dan media yang relevan. Dalam mengumpulkan data-data tersebut akan banyak memanfaatkan media internet yang relevan sebagai sumber data utama. Tujuan tersebut untuk mengetahui secara benar bagaimana Kepemimpinan Politik Joko Widodo Dalam Politik Luar Negeri

C. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo yang bersifat “Inward looking” merupakan prinsip dasar dalam politik luar negeri Indonesia yang dikenal sebagai prinsip “bebas-aktif”. Prinsip “Bebas aktif” dalam politik luar negeri Indonesia mempunyai makna yang mendalam. Pertama, politik luar negeri Indonesia bertujuan untuk menjaga keutuhan jati diri bangsa. Makna kedua dari “bebas aktif” adalah bahwa politik luar negeri juga memiliki tujuan untuk mencapai cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat. dan berperan dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Meskipun tujuan yang terakhir mungkin

tampak lebih berorientasi eksternal, politik luar negeri juga dimaksudkan untuk mendukung pencapaian dua cita-cita pertama yang lebih berfokus pada aspek internal. Dimana visi misi hubungan luar negeri Presiden Joko Widodo terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan memiliki kepribadian yang berlandaskan gotong royong. Komitmen yang kuat untuk bersikap dan bertindak “aktif” guna mencapai kemandirian nasional dengan melalui kerjasama yang positif dan konstruktif.

Dimana Presiden Joko Widodo telah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam Upaya memenangkan kampanye untuk mendukung doktrin poros maritim, Presiden Joko Widodo menggunakan jalur diplomasi yang ditempuh. Diplomasi merupakan alat untuk mencapai kepentingan nasional dan melaksanakan kebijakan luar negeri yang di putuskan suatu negara.

Saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo melakukan sebuah kunjungan pertamanya ke beberapa negara anggota ASEAN pada tahun 2014 dan 2015 sebagai bagian dari tradisi pengenalan pemimpin baru ke negara-negara ASEAN serta mengkomunikasikan sebuah kebijakan baru yaitu, menekankan kedudukan negara Indonesia sebagai negara maritim dan sekaligus menjelaskan visi poros maritim dunia. Tindakan ini dapat dianggap sebagai ofensif diplomasi yang akhirnya berhasil menyepakati sejumlah perjanjian dan komunike bersama termasuk perjanjian kerjasama dalam bidang keamanan seperti pemberantasan penyeludupan senjata, lalu lintas teroris dan pemberantas *illegal fishing*.

Selain itu, Presiden Joko Widodo ikut aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional seperti, APEC, G20, KTT, OKI, forum multilateral, G15 dan sebagainya, yang dimana forum-forum ini digunakan untuk memperoleh dukungan negara-negara asing terhadap gagasan poros maritim dunia dengan tujuan untuk mencapai penerimaan internasional yang lebih luas terhadap gagasan tersebut. Dimana Presiden Joko Widodo menegaskan doktrin poros maritim yang diusung Indonesia sebagai solusi untuk membangkitkan kedaulatan ekonomi dan politik bangsa. Dalam perdagangan impor dan ekspor melalui jalur laut menurutnya akan semakin mengukuhkan arti penting industri maritim mengingat ada dua samudera strategis dunia yaitu, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan jalur penting dalam perdagangan global.

Dalam konsep maritim dunia menekankan pada pemanfaatan jalur transportasi laut yang kerap dihadapkan dengan berbagai sebuah tantangan salah satunya bidang pertahanan dan keamanan. Presiden Joko Widodo memanfaatkan strategis Indonesia yang memiliki peran sebagai jalur transportasi laut dan perdagangan strategis dengan merancang strategi pembangunan laut dengan mencakup infrastruktur pertahanan dan keamanan laut hingga pemanfaatan sumber daya laut.

Dalam melaksanakan rancangan strategi tersebut meliputi beberapa aspek penting yang menjadi difokuskan. Pertama, pemerintah menerapkan Ocean Based Development Indonesia dengan lebih memprioritaskan sektor laut, tindakan ini menekankan bahwa kedaulatan juga dapat dilihat dari sudut pandang pengelolaan perairan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, maka diperlukan untuk memprioritaskan pembangunan industri dan pertahanan laut. Selanjutnya yang kedua mengenai aspek pertahanan dan keamanan, Presiden Joko Widodo mengusung strategi penguatan maritim yang bertujuan untuk membuat konektivitas serta memaksimalkan penggunaan jalur komunikasi dan transportasi laut (SLOC dan SLOT) yang merupakan jalur perbatasan yang sering dilintasi kapal-kapal asing. Penguatan konektivitas dianggap sebagai solusi untuk menjaga jalur perbatasan laut yang bersentuhan langsung dengan wilayah perairan negara lain, sehingga diharapkan dapat menerbitkan kapa lasing dan mengurangi tindakan ilegal seperti illegal fishing yang merugikan sumber daya laut dan melanggar batas yurisdiksi. Dalam menekankan pentingnya pertahanan dan keamanan maritim dengan membentuk Kementerian Kemaritiman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) bertujuan untuk mendukung kinerja Presiden dan meningkatkan keamanan maritim yang melibatkan TNI Angkatan Laut (AL) yang bekerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan kualitas pasukan dan pertahanan.

Dimana pada periode pertama masa Jabata Presiden Joko Widodo terdapat banyak perjanjian internasional di bidang pertahanan yang telah diratifikasi. Perjanjian internasional yang diratifikasi pada masa awal Presiden Joko Widodo sebagian besar telah di tandatangani pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam sektor pertahanan sangat menekankan peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan, terdapat tiga arah pembangunan yang diutamakan yaitu pemenuhan kebutuhan alusista, peningkatan kesiapan operasi TNI dan peningkatan fasilitas perumahan dan pelatihan prajurit TNI. Dengan fokus utamanya membangun TNI diharapkan menjadi sebuah aparat yang lebih modern dan memastikan kecukupan persenjataan dalam pertahan, Dimana pada periode kedua selama masa jabatan Presiden Joko Widodo telah menandatangani berbagai perjanjian bilateral dalam sektor pertahanan. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi melalui peraturan undang-undang dengan menekankan bahwa setiap perjanjian harus memberi sebuah manfaat langsung bagi negara. Dalam perjanjian internasional tersebut meliputi beragam aspek mulai dari saling bertukar informasi, pelatihan bersama, hingga kerjasama dalam bidag IPTEK dan industri pertahanan lainnya.

Dimana Presiden Joko Widodo dalam politik luar negeri Indonesia juga memiliki fokus pada aspek ekonomi. Kita ketahui negara Indonesia berada dikawasan di Asia

Tenggara dan bergabung dalam anggota ASEAN (Association of South Asian Nations) yang dimana negara Indonesia tidak lepas dari pemberlakuan AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang ditengah situasi regional ini, negara Indonesia perlu Bersiap menghadapi pasar bebas khususnya di Asia Tenggara.

Demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia sebagai tujuan nasional. Indonesia harus melakukan reformasi terutama dalam sektor infrastruktur, deregulasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas produk. Tugas ini merupakan tanggung jawab pemerintahan, Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan luar negeri yang menekankan diplomasi ekonomi. Dimana diplomasi ekonomi mencakup dengan pengelolaan hubungan luar negeri di bidang ekonomi seperti aktivitas impor dan ekspor, pinjaman dan bantuan luar negeri, perdagangan internasional dan investasi.

Untuk mengantisipasi AFTA dan mendukung prioritas pembangunan serta pembenahan infrastruktur Indonesia, Presiden Joko Widodo banyak melakukan kegiatan “diplomasi ekonomi” termasuk diplomasi yang dilakukan dalam beberapa kunjungan kenegaraan untuk mencari investor asing yang bersedia berinvestasi di Indonesia dengan harapan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai contoh Ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan resmi ke negara Rusia pada tanggal 18-20 Mei 2016, Presiden Joko Widodo berhasil mencapai berbagai kesepakatan penting. Salah satunya merupakan perjanjian dengan perusahaan Rusia yaitu, Russian Railways untuk membangun jalur kereta api di Kalimantan. Selain itu, terdapat kesepakatan ekonomi yang signifikan ketika salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di negara Rusia berkomitmen untuk mendirikan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur dengan nilai investasi mencapai Rp. 176 triliun. Para investor asing untuk berinvestasikan di Indonesia membuat terciptanya sebuah lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Menurut Todaro investasi memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi suatu bangsa karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja. Tidak hanya sebatas pada upaya mencari investasi asing untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Presiden Joko Widodo juga aktif dalam mengangkat isu ekonomi, khususnya berkaitan dengan produk CPO (Crude Palm Oil) Indonesia. Saat menerima kunjungan Menteri Perdagangan dan Industri Rusia yang bernama Denis Manturov di Jakarta, Presiden Joko Widodo membahas potensi kerjasama ekspor CPO dan ikan, Presiden Joko Widodo berharap hambatan-hambatan non-tarif dalam perdagangan dapat diatasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Selain itu dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara Jerman berupaya meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan vokasional sebagai upaya memperkuat sumber daya manusia (SDM) Indonesia, sehingga negara Indonesia bisa bersaing secara kompetitif di tingkat regional (ASEAN Economic Community) maupun global.

Dimana Presiden Joko Widodo dalam diplomasi ekonomi juga berkeinginan untuk menguasai pasar halal dunia. Pasar halal dunia merupakan produk-produk halal yang bersaing untuk mendominasi dan memberikan keuntungan ekonomi bagi negara. Dizaman sekarang halal bukan lagi sekedar konsep keagamaan tradisional, tetapi menjadi sebuah gaya hidup sebagian besar orang. Pasar halal dunia menjadi salah satu target negara Indonesia karena berpotensi besar untuk penambahan devisa negara. Negara Indonesia masih tertinggal dalam ekspor halal dibandingkan dengan beberapa negara, namun negara Indonesia memiliki sebuah ambisi besar untuk mengembangkan ekspor produk Halal Food and Beverages, ditandai dengan digarapnya Master Plan Komite Nasional Keungan Syariah (KNKS) 2019 yang mendorong penguatan ekonomi syariah termasuk ekspor produk halal.

Dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang politik luar negeri Indonesia di prioritaska pada diplomasi ekonomi, maka Muslim Friendly Tourism menjadi sektor yang potensial karena pariwisata menjadi salah satu alat diplomasi soft power suatu negara dalam politik internasional. Hal ini sejalan dengan tujuan diplomasi ekonomi Indonesia untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan asing untuk meningkatkan devisa negara. Negara Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam upaya menguasai pasar hala dunia dengan penggunaan standar operasional prosedur (SOP) oleh kelembagaan. Salah satunya adalah pendirian Lembaga penkaji pangan, obat-obatan dan kosmetik oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989 yang dikenal sekarang LPPOM MUI yang diharapkan produk halal Indonesia dapat ditinjau dengan lebih komprehensif sehingga dapat menemukan produk yang berpotensi memajukan industri halal Indonesia. Proses organisasi tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga multilateral melalui diplomasi ekonomi contohnya negara Indonesia menyelenggarakan Forum Investasi Ekonomi Halal Indonesia pada tahun 2019 yang membantu para bisnis di luar negeri mendapatkan informasi dan prospek akurat mengenai produk halal dari Indonesia. Pada kesempatan lain Indonesia melakukan diplomasi ekonomi untuk pasar halal dunia yaitu, menjadi tuan rumah Halal Summit 2020, Menteri Luar Negeri Indonesia yang bernama bu Retno Marsudi mengundang Menteri Luar Negeri Maroko yang bernama Nasser Bourita ke Indonesia, mengingat Maroko merupakan mitra dagang Indonesia dan telah menjaga hubungan baik selama bertahun-tahun. Upaya diplomasi ekonomu yang terus menerus di bawah Kepresidenan Joko Widodo untuk menguasai

pasar halal dunia tidak sia-sia karena telah memberikan manfaat ekonomi yang baik bagi negara Indonesia maupun negara mitra. Dalam State of the Global Islamic Economy Report 2019-2020 juga di beritakan peringkat negara Indonesia dalam ekonomi Islam dunia meningkat dari peringkat 10 menjadi peringkat 5, sementara posisi satu sampai empat berturut-turut diduduki oleh negara Malaysia, UAE, Bahrain dan Arab Saudi. Meskipun begitu jika dibandingkan secara keseluruhan penguasaan terhadap pasar halal global masih kalah dengan negara non-muslim seperti negara Brazil, Australia dan Kanada. Negara Indonesia akan terus berusaha untuk menguasai halal dunia dengan diplomasi ekonomi dan lain sebagainya.

D. Kesimpulan

Setiap negara memiliki kepemimpinan politik yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola negara kearah yang lebih baik. Salah satunya negara Indonesia yang memiliki seorang kepemimpinan politik dalam mengatur dan mengelola negara Indonesia yang bernama Joko Widodo yang merupakan Presiden Indonesia yang ke-7 setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terpilihnya Presiden Joko Widodo melalui pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang di adakan 5 tahun sekali.

Setiap kepemimpinan politik memiliki ciri khas dalam politik luar negeri Indonesia sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Dimana Presiden Joko Widodo dalam politik luar negeri Indonesia orientasi ke “dalam” (Inward looking) dengan prinsip bebas aktif. Visi misi hubungan luar negeri Presiden Joko Widodo yaitu, terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan memiliki kepribadian yang berlandaskan gotong royong, dengan komitmen yang kuat bersikap dan bertindak “aktif” guna mencapai kemandirian nasional dengan melalui kerjasama yang positif dan konstruktif.

Presiden Joko Widodo berkeinginan menjadikan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan memanfaatkan letak geografis Indonesia yang strategis yang terdapat persimpangan dua samudera strategis dunia yaitu, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan jalur transportasi laut dalam perdagangan dunia. Upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo agar memperoleh dukungan doktrin poros maritim dengan menggunakan jalur diplomasi dengan mengikuti forum-forum internasional seperti ASEAN, OKI dan sebagainya. Presiden Joko Widodo dalam berkeinginan menjadikan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia karena sebagai solusi untuk membangkitkan keadaulatan ekonomi dan politik bangsa. Dimana negara Indonesia berkeingin menjadi poros maritim dunia diperlukan juga aspek pertahanan dan keamanan laut. Presiden Joko Widodo dalam

menekankan pentingnya pertahanan dan keamanan maritim dibentuknya Kementerian Kemaritiman dan Kementerian Kelautan, meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan yang melibatkan TNI Angkatan Laut serta membuat berbagai perjanjian bilateral dalam sektor pertahanan dan keamanan yang tujuannya diharapkan dapat menerbitkan kapal asing dan meberantasi tindakan ilegal salah satunya seperti illegal fishing.

Dalam hal ekonomi, Presiden Joko Widodo juga aktif dalam diplomasi ekonomi dalam beberapa kunjungan negara untuk mencari investor asing yang bersedia berinvestasi di Indonesia dengan harapan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur yang merata di Indonesia. Selain itu Indonesia juga berkeinginan untuk menguasai pasar halal dunia dengan menggunakan diplomasi ekonomi dengan mempromosikan produk-produk halal negara Indonesia dengan menyelenggarakan forum-forum internasional dengan bertemakan produk halal dengan mengundang beberapa negara. Produk halal Indonesia untuk mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dibentuk sebuah lembaga yaitu LPPOM MUI yang diharapkan produk halal Indonesia dapat ditinjau dengan lebih komprehensif sehingga dapat menemukan produk yang berpotensi memajukan industri halal Indonesia. Proses organisasi tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga multilateral melalui diplomasi ekonomi. Upaya diplomasi ekonomi yang terus menerus di bawah Kepresidenan Joko Widodo untuk menguasai pasar halal dunia tidak sia-sia karena dalam State of the Global Islamic Economy Report 2019-2020 juga di beritakan peringkat negara Indonesia dalam ekonomi Islam dunia meningkat dari peringkat 10 menjadi peringkat 5.

Dengan demikian politik luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan politik Presiden Joko Widodo memiliki fokus pada memajukan ekonomi, menjadi poros maritim dunia, menjaga kedaulatan dan meningkatkan peran Indonesia dalam lingkup dunia.

Daftar Pustaka

Buku

Saputro, A., & Taufiequrrohman, T. (2021). Investasi dalam Bingkai Politik Luar Negeri Pemerintahan Jokowi Jilid Satu dan Dampaknya bagi Masyarakat Indonesia. *PERSPEKTIF*, 10(2), 450-466.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Yanuar, Ikbar. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Editama. Hal. 202.

Jurnal

- Maiwan, M. (2017). Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(1), 94-115.
- Situmorang, M. (2015). Orientasi kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11(1).
- Delanova, M. O. (2017). Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Penguatan Diplomasi Ekonomi. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2(02), 154-172.
- Mila, N., Vida, F., & Adi, D. P. (2020). Sejarah Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pasca Reformasi. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 73-100.
- Alvian, R. A., Putri, G. C., & Ardhani, I. (2018). Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2), 148-163.
- Maksum, A. (2015). Poros maritim dan politik luar negeri Jokowi. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 4(1), 1-26.
- Wargi, S. (2021). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Era Jokowi Melalui Diplomasi Ekonomi Dalam Upaya Untuk Menguasai Pasar Halal Dunia. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 320-341.
- Maku, A. J. (2023). Pola Ratifikasi Perjanjian Internasional di Sektor Pertahanan Era Presiden Joko Widodo. *Jurnal Arajang*, 6(1), 59-80.
- Madu, L. (2014). Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia pada Pemerintahan Joko Widodo, 2014–2019. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur*, 9(2), 104.

Website

<https://kumparan.com/rara-oktorina-masayu/menelisik-lebih-jauh-gaya-kepemimpinan-presiden-jokowi-1zRX3VB78kf>

<https://www.neliti.com/publications/242898/kepemimpinan-politik-isu-moralitas-dan-kapabilitas-rezim-pemerintahan>